

PENGELOLAAN BELIMBING RICE TERRACES SEBAGAI DESTINASI WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT: TANTANGAN, PARTISIPASI, DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN DI DESA BELIMBING, PUPUAN, TABANAN

I Made Sarwabagus¹, Ida Ayu Ari Yuliadewi²

Alumni UHN Ida Bagus Sugriwa¹, Akademi Pariwisata Denpasar²

Correspondence Author: bagusloce@gmail.com

Informasi Artikel

Article History;

Received:

Revised :

Accepted:

Published:

Kata Kunci:

*Belimbing Rice
Terraces; pariwisata
berbasis masyarakat;
sistem subak;
pengelolaan destinasi*

Keyword:

*Belimbing Rice
Terraces; community-
based tourism, subak
system; destination
management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Belimbing Rice Terraces sebagai daya tarik wisata alam berbasis masyarakat lokal di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kawasan Belimbing Rice Terraces memiliki potensi ekologis dan budaya tinggi, pengelolaannya belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat masih terbatas, kelembagaan Pokdarwis belum efektif, dan regulasi desa belum tersedia. Tantangan utama meliputi lemahnya infrastruktur pendukung, kurangnya promosi digital, dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata. Strategi yang direkomendasikan mencakup penguatan kelembagaan lokal, penyusunan regulasi desa, pengembangan paket wisata edukatif berbasis budaya agraris, serta promosi digital terpadu. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas.

Abstract

This study aims to analyze the management of Belimbing Rice Terraces as a community-based natural tourism attraction in Belimbing Village, Pupuan District, Tabanan Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings reveal that although Belimbing Rice Terraces possess significant ecological and cultural potential, their management remains suboptimal. Community participation is still limited, the tourism awareness group (Pokdarwis) is not yet functioning effectively, and there is no village regulation governing tourism management. Key challenges include inadequate infrastructure, lack of digital promotion, and low community capacity in managing tourism resources. Recommended strategies include strengthening local institutions, drafting village-level regulations, developing educational tourism packages based on agrarian culture, and implementing integrated digital promotion. This study highlights the importance of community empowerment and the preservation of local

values in achieving sustainable community-based tourism development.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan hujan tropis, danau, hingga lanskap sawah terasering, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata alam yang memiliki daya saing tinggi. Dalam konteks pembangunan nasional, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor penghasil devisa, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa kawasan strategis pariwisata memiliki pengaruh penting terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembangunan pariwisata adalah Community-Based Tourism (CBT), yaitu model pengembangan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya wisata (Suansri, 2003; Timothy, 2002). Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal (Scheyvens, 1999). Menurut Pretty (1995), keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pariwisata berbasis masyarakat dipandang sebagai strategi yang relevan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki potensi wisata namun belum berkembang secara optimal.

Dalam konteks Bali, pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Bali dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang memiliki karakteristik unik melalui penerapan filosofi Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Filosofi ini menjadi landasan penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Sudiarta, 2021). Salah satu manifestasi hubungan harmonis tersebut dapat ditemukan pada sistem pertanian tradisional Subak yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi, tetapi juga merepresentasikan nilai sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Bali (Lansing, 2006).

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu wilayah di Bali yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata berbasis alam dan budaya. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan sistem Subak yang masih lestari serta lanskap persawahan yang menjadi daya tarik wisata. Salah satu destinasi yang memiliki potensi tersebut adalah Belimbing Rice Terraces yang berlokasi di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Lanskap sawah terasering yang membentang di kawasan ini menawarkan nilai estetika,

ekologis, dan edukatif yang tinggi. Menurut Cooper et al. (2008), daya tarik wisata alam seperti sawah terasering tidak hanya memiliki nilai visual, tetapi juga berpotensi menjadi sarana edukasi dan konservasi yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan lokal, tingkat partisipasi masyarakat, dan dukungan para pemangku kepentingan. Prayogi et al. (2024) menemukan bahwa penguatan kelembagaan Pokdarwis dan penerapan ekonomi hijau di Desa Wisata Pengelipuran mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal. Temuan serupa disampaikan oleh Yulianie et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat melalui Pokdarwis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wisata budaya di Kampung Todo memberikan dampak positif terhadap distribusi manfaat ekonomi dan pelestarian warisan budaya. Sementara itu, penelitian Febrian (2020) menunjukkan bahwa penerapan CBT di Kampung Blekok, Situbondo, mampu menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kreativitas masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi manfaat dan lemahnya perencanaan pengelolaan.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak selalu berjalan optimal. Romeon et al. (2021) menemukan bahwa pengelolaan Desa Wisata Negeri Saleman masih menghadapi permasalahan kelembagaan karena struktur organisasi yang bersifat informal dan belum mampu mengelola potensi wisata secara maksimal. Murphy (1985) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Namun, Tosun (2000) mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat di negara berkembang sering kali masih bersifat simbolis (*tokenistic participation*), sehingga masyarakat belum memperoleh posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek keadilan ekologis, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Mowforth & Munt, 2009).

Meskipun Belimbing Rice Terraces memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaannya belum berjalan secara optimal. Pengelolaan destinasi masih dilakukan secara informal dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata telah mulai berkembang, namun masih terbatas pada tingkat operasional dan belum terintegrasi dalam mekanisme pengelolaan yang terstruktur. Selain itu, berbagai kendala seperti minimnya promosi digital, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata, belum tersedianya paket wisata yang terorganisasi, rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi, serta belum adanya regulasi desa yang mengatur tata kelola pariwisata menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia.

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian mengenai CBT berfokus pada peran partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi wisata. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat pada kawasan sawah terasering yang terintegrasi dengan sistem Subak dan nilai-nilai lokal Bali masih relatif

terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap potensi, sistem pengelolaan, bentuk partisipasi masyarakat, serta tantangan pengembangan Belimbing Rice Terraces sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Belimbing Rice Terraces sebagai daya tarik wisata alam berbasis masyarakat di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan lokal dalam pengelolaannya, serta merumuskan strategi pengembangan yang mendukung keberlanjutan destinasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Community-Based Tourism dan menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, Pokdarwis, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan di kawasan pedesaan Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan Belimbing Rice Terraces dilakukan oleh masyarakat lokal serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya sebagai daya tarik wisata alam berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi dinamika sosial dan kultural dalam pengelolaan pariwisata dari sudut pandang aktor lokal, serta mengungkap makna dan strategi yang mereka terapkan dalam konteks lokal yang kompleks (Creswell, 2012).

Lokasi penelitian berada di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa ini dipilih secara purposif karena memiliki potensi pariwisata alam yang tinggi melalui lanskap sawah berundak yang masih alami serta sistem pertanian tradisional subak yang mengandung nilai-nilai ekologis dan budaya. Selain itu, keberadaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan dukungan komunitas lokal menjadikan desa ini relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi kegiatan masyarakat serta fasilitas pariwisata. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen perencanaan desa, laporan kelembagaan pariwisata, publikasi pemerintah daerah, serta literatur ilmiah terkait community-based tourism dan pengelolaan destinasi wisata alam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur terhadap berbagai pihak yang relevan, antara lain Kepala Desa Belimbing, Kelian Subak, pengurus Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan perwakilan Dinas Pariwisata Tabanan. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi, partisipasi, serta strategi pengelolaan destinasi wisata yang diterapkan. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas wisata, interaksi masyarakat dengan wisatawan, serta kondisi infrastruktur dan daya tarik alam yang tersedia. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, brosur, papan informasi, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di Belimbing.

Penentuan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi dan pengetahuan informan terhadap objek kajian. Informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki peran strategis dan keterlibatan aktif dalam proses pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara tematik untuk mempermudah penafsiran. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mengkaji pola dan keterkaitan antar data untuk merumuskan temuan yang menjawab rumusan masalah. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memperoleh gambaran yang valid dan komprehensif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Pengelolaan Belimbing Rice Terraces

Belimbing Rice Terraces merupakan lanskap agraris sawah berundak yang terletak di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kawasan ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat dengan menerapkan sistem irigasi Subak. Sistem ini bukan sekadar teknologi pengairan, melainkan bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bali yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam (Lansing, 2006).

Keunikan bentang alam yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual ini menjadikan Belimbing Rice Terraces memiliki daya tarik tinggi baik secara ekologis, estetis, maupun budaya. Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini belum dikelola secara optimal sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat. Meskipun potensinya sangat menjanjikan, pengelolaan destinasi masih bersifat sporadis dan belum terorganisasi secara kelembagaan.

Observasi yang dilakukan menunjukkan sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan kawasan, antara lain:

a. Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata

Fasilitas dasar pariwisata seperti papan informasi, jalur trekking, toilet umum, tempat istirahat, tempat parkir, serta pusat informasi belum tersedia dengan baik. Tidak adanya infrastruktur penunjang menyebabkan pengalaman wisatawan menjadi terbatas, dan ini berdampak langsung pada tingkat kunjungan serta lama tinggal wisatawan.

b. Promosi dan Publikasi yang Belum Maksimal

Upaya promosi wisata masih terbatas dalam lingkup lokal dan belum memanfaatkan platform digital secara optimal. Belum terdapat situs web resmi desa wisata maupun pemanfaatan media sosial yang dikelola oleh Pokdarwis atau komunitas. Padahal,

menurut Cooper et al. (2008), strategi promosi yang efektif sangat menentukan daya saing destinasi di era globalisasi digital.

c. Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Mayoritas masyarakat Desa Belimbing masih menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Kegiatan wisata hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan yang bersifat musiman. Oleh karena itu, pengembangan wisata belum dianggap prioritas, dan keterlibatan masyarakat masih bersifat pasif. Hal ini mengakibatkan rendahnya rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata (sense of ownership) yang penting dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas (Murphy, 1985).

d. Belum Ada Sistem Pengelolaan Terpadu

Meskipun terdapat inisiatif individu seperti pembukaan homestay, jasa trekking, dan penjualan kuliner lokal, semua kegiatan ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum didukung oleh sistem manajemen terpadu. Pokdarwis Desa Belimbing sudah terbentuk, namun belum berfungsi secara optimal karena lemahnya struktur organisasi dan belum tersusunnya rencana pengelolaan destinasi secara partisipatif.

e. Ketiadaan Regulasi dan Zonasi Wisata

Desa belum memiliki regulasi formal atau peraturan desa yang secara eksplisit mengatur tata kelola pariwisata alam dan distribusi manfaatnya. Ketiadaan peraturan ini menyulitkan pembagian tanggung jawab dan manfaat antarwarga, dan menjadi kendala dalam menarik dukungan dari pemangku kepentingan luar seperti pemerintah daerah maupun lembaga donor (Suansri, 2003).

Masalah-masalah di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan kondisi aktual pengelolaan, sebagaimana juga ditunjukkan dalam studi oleh Yulianie et al. (2024) yang menemukan bahwa banyak desa wisata di Indonesia mengalami hal serupa karena lemahnya kelembagaan, kurangnya pelatihan manajemen pariwisata, dan minimnya sinergi antaraktor. Sebagaimana dikemukakan oleh Murphy (1985), keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan, dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan. Dalam konteks Desa Belimbing, keterlibatan masyarakat masih bersifat individual dan belum didukung oleh kelembagaan dan kebijakan desa yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penguatan kelembagaan, pelatihan kapasitas SDM, serta regulasi desa yang adaptif dan inklusif agar Belimbing Rice Terraces dapat berkembang sebagai destinasi wisata alam berbasis komunitas yang berkelanjutan.

2. Tingkat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism). Dalam konteks Desa Belimbing, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Belimbing Rice Terraces masih tergolong terbatas, baik dari segi cakupan, bentuk, maupun intensitas. Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai terlibat dalam kegiatan wisata, seperti membuka homestay secara mandiri, menjadi pemandu trekking untuk wisatawan asing dan domestik, atau menjual produk makanan dan

minuman lokal. Namun, partisipasi ini masih bersifat individual, informal, dan belum terkoordinasi dalam sistem pengelolaan terpadu.

Keterlibatan masyarakat lebih banyak terjadi pada level operasional yang bersifat pasif atau reaktif, bukan pada tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kegiatan pariwisata. Misalnya, masyarakat hanya menyediakan jasa akomodasi atau menjadi penyedia tenaga kerja saat ada permintaan wisata, tetapi tidak terlibat dalam menyusun paket wisata atau strategi promosi destinasi. Kegiatan wisata belum dianggap sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang desa, melainkan sebagai aktivitas tambahan yang tidak terlalu terikat dengan kehidupan agraris mereka yang utama.

Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari pariwisata. Banyak warga masih memandang bahwa pariwisata adalah kegiatan eksternal yang dikendalikan oleh pihak luar dan tidak relevan dengan kehidupan pertanian mereka. Kedua, tidak tersedianya pelatihan atau sosialisasi berkelanjutan tentang potensi ekonomi dan sosial dari pengelolaan wisata secara kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan Suansri (2003) yang menekankan bahwa pelatihan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi dasar dalam menciptakan keberhasilan CBT.

Menurut konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Scheyvens (1999), partisipasi masyarakat dalam konteks CBT idealnya mencakup empat aspek utama, yakni (1) aspek sosial, di mana masyarakat memperoleh manfaat finansial secara langsung; (2) aspek politik, di mana masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan; dan (3) aspek psikologis, di mana tumbuhnya rasa percaya diri dan kontrol terhadap arah pembangunan.

Namun, berdasarkan data di Desa Belimbing, partisipasi masyarakat baru menyentuh sebagian kecil aspek ekonomi. Sebagian warga yang mengelola homestay atau menjadi pemandu telah memperoleh tambahan pendapatan, tetapi manfaat ini belum merata. Dalam aspek sosial dan psikologis, keterlibatan belum mendorong peningkatan rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata, dan dalam aspek politik, masyarakat belum dilibatkan dalam forum musyawarah atau perencanaan wisata secara sistematis.

Hal ini diperkuat oleh Tosun (2000), yang menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, partisipasi masyarakat sering kali bersifat simbolis (tokenistic), akibat terbatasnya akses terhadap informasi, rendahnya pendidikan pariwisata, dan dominasi aktor eksternal, termasuk elit lokal. Situasi ini juga terjadi di Belimbing, di mana belum tersedia platform yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi atau dilibatkan secara inklusif dalam penyusunan peraturan desa terkait tata kelola wisata.

Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan terpadu, fasilitasi pembentukan kelompok kerja pariwisata berbasis dusun, serta penyusunan kebijakan desa yang mendorong partisipasi yang substansial dan setara, bukan sekadar formalitas. Program-program tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menciptakan model CBT yang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata desa.

3. Kelembagaan dan Peran Pokdarwis

Dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, keberadaan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memegang peran strategis sebagai penggerak utama kegiatan kepariwisataan di tingkat desa. Pokdarwis berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk mengelola potensi wisata secara kolektif, mengembangkan program kerja, membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar, serta menjamin pemerataan manfaat bagi komunitas (Timothy, 2002).

Desa Belimbing telah memiliki kelembagaan Pokdarwis, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsinya belum berjalan secara optimal. Struktur organisasi Pokdarwis belum tersusun dengan baik; tidak ada pembagian tugas yang jelas antaranggota, belum tersusun program kerja tahunan, serta belum tersedia sistem dokumentasi kegiatan yang sistematis. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat dan pengurus Pokdarwis, disebutkan bahwa lembaga ini masih bersifat formalitas dan jarang mengadakan pertemuan rutin. Kegiatan wisata sebagian besar berjalan atas inisiatif individu, bukan hasil koordinasi kelembagaan.

Selain itu, belum terdapat rencana pengelolaan destinasi (destination management plan) yang mencakup zonasi kawasan, pembagian wilayah konservasi dan komersial, serta system retribusi atau mekanisme bagi hasil yang adil antara pelaku dan desa. Padahal, dalam prinsip Community-Based Tourism (CBT), transparansi kelembagaan dan kejelasan sistem pengelolaan merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan tidak hanya menguntungkan segelintir individu (Suansri, 2003; Okazaki, 2008).

Kondisi ini mengakibatkan lemahnya daya dorong kelembagaan dalam mengorganisasi kegiatan wisata, mengembangkan produk wisata terpadu, dan melakukan promosi destinasi secara profesional. Menurut hasil dokumentasi, belum ada materi promosi yang dikelola oleh Pokdarwis secara digital maupun cetak, dan tidak terdapat sistem pencatatan data kunjungan wisatawan. Hal ini membuat akuntabilitas pengelolaan dan evaluasi dampak pariwisata terhadap ekonomi dan lingkungan menjadi sulit dilakukan.

Kelembagaan yang lemah juga berdampak pada minimnya koordinasi lintas sektor, baik dengan kelompok Subak, desa adat, maupun pemerintah daerah. Belum terdapat forum komunikasi rutin yang mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk membahas arah pengembangan wisata desa secara partisipatif. Situasi ini bertentangan dengan prinsip multi- stakeholder governance yang dianjurkan dalam praktik CBT, di mana seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok adat dan perempuan, seharusnya memiliki ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan (Murphy, 1985).

Sebagaimana diungkapkan oleh Timothy (2002), kelembagaan lokal yang efektif harus bersifat inklusif, memiliki akuntabilitas, dan mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam konteks Desa Belimbing, pembenahan Pokdarwis menjadi sangat krusial, baik dari aspek kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen organisasi, hingga penyusunan regulasi kelembagaan yang berpihak pada kepentingan komunitas.

Penting juga untuk mendorong sinergi antara Pokdarwis dengan aparat desa dan lembaga adat melalui peraturan desa (Perdes) yang mengatur secara eksplisit fungsi kelembagaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan temuan Prayogi et al. (2024), yang menunjukkan bahwa keberhasilan Pokdarwis di Desa Pengelipuran didukung oleh

struktur yang kuat, legitimasi kelembagaan, serta program kerja yang berbasis pada filosofi lokal.

Dengan demikian, kelembagaan Pokdarwis di Desa Belimbing perlu direvitalisasi sebagai langkah awal membangun sistem pengelolaan wisata yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

4. Tantangan Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Pengembangan Belimbing Rice Terraces sebagai daya tarik wisata alam berbasis masyarakat menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan sosial yang saling berkaitan. Meskipun potensi alam dan budaya di kawasan ini sangat menonjol, keterbatasan dalam infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi kelembagaan telah menghambat realisasi potensi tersebut secara optimal.

a. Keterbatasan Infrastruktur Fisik

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan wisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan, fasilitas seperti akses jalan menuju lokasi wisata, jalur trekking yang aman dan terawat, toilet umum, tempat istirahat, papan penunjuk arah, serta lokasi parkir belum tersedia secara memadai. Infrastruktur yang terbatas ini tidak hanya menghambat kenyamanan wisatawan, tetapi juga menurunkan daya saing destinasi di tengah persaingan wisata alam lainnya di Bali (Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2021).

b. Lemahnya Promosi dan Pemasaran Digital

Promosi wisata Desa Belimbing masih bersifat konvensional dan belum menyentuh platform digital secara efektif. Tidak ditemukan situs web resmi, media sosial aktif, atau kolaborasi dengan marketplace wisata daring. Minimnya strategi digital marketing menjadikan kawasan ini kurang dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, meskipun secara potensi sangat kompetitif. Padahal, menurut Cooper et al. (2008), pemasaran yang strategis dan adaptif terhadap teknologi digital adalah kunci keberhasilan promosi destinasi di era global.

c. Rendahnya Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap nilai pariwisata berbasis budaya agraris dan ekologi Subak masih rendah. Sebagian besar warga lebih memandang pariwisata sebagai aktivitas sampingan yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupan agraris mereka. Hal ini menghambat pembentukan sense of ownership terhadap destinasi dan mengurangi dorongan kolektif untuk menjaga kelestarian kawasan. Selain itu, belum ada pelatihan intensif dan berkelanjutan yang diberikan kepada masyarakat terkait manajemen wisata, pelayanan, komunikasi wisatawan, maupun pengelolaan homestay dan guiding.

d. Belum Adanya Regulasi Khusus dan Zonasi Wisata

Hingga saat ini belum terdapat peraturan desa (Perdes) atau regulasi lokal lainnya yang mengatur tata kelola wisata alam di kawasan Belimbing secara eksplisit. Tidak adanya regulasi menyebabkan pembagian peran, manfaat, dan tanggung jawab antaraktor menjadi tidak jelas. Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan yang transparan dan berkeadilan. Padahal, menurut Murphy (1985), keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat sangat bergantung pada kejelasan aturan dan struktur kepemimpinan lokal.

e. Tidak Tersedianya Data Kunjungan dan Sistem Evaluasi

Desa Belimbing belum memiliki sistem dokumentasi data kunjungan wisatawan, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Tidak adanya data ini membuat desa kesulitan mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas wisata. Akibatnya, tidak tersedia dasar bukti (evidence-based) untuk menyusun strategi perbaikan pengelolaan. Padahal, sistem monitoring dan evaluasi berbasis data sangat penting dalam kerangka pembangunan pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan (Miles & Huberman, 1994).

f. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Secara kelembagaan, belum terdapat koordinasi yang sinergis antara Pokdarwis, desa adat, kelompok Subak, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata. Akibatnya, inisiatif pengelolaan sering kali berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam kerangka perencanaan jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan analisis Okazaki (2008) yang menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan CBT di negara berkembang adalah lemahnya sinergi antaraktor dan keterbatasan sistem kolaborasi multi-pihak.

5. Strategi Pengembangan Berbasis Partisipasi dan Kearifan Lokal

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting, bentuk partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Belimbing Rice Terraces, diperlukan formulasi strategi yang tidak hanya responsif terhadap masalah yang ada, tetapi juga visioner dalam membangun desa wisata berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini bertumpu pada prinsip community-based tourism (CBT) sebagaimana dikembangkan oleh Suansri (2003), yang meliputi partisipasi aktif masyarakat, pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta distribusi manfaat yang adil.

a. Penguatan Kelembagaan Lokal (Pokdarwis)

Langkah awal yang paling mendesak adalah revitalisasi kelembagaan Pokdarwis sebagai motor penggerak pariwisata desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek tata kelola organisasi, manajemen wisata, pelayanan dan keramahtamahan (hospitality), hingga pemasaran digital. Penguatan kapasitas ini penting untuk memastikan Pokdarwis tidak hanya hadir secara formal, tetapi mampu menjalankan peran koordinatif, edukatif, dan representatif dalam pengelolaan destinasi (Timothy, 2002; Prayogi et al., 2024).

b. Penyusunan Regulasi Desa (Perdes)

Strategi kedua adalah penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola pariwisata secara partisipatif. Perdes ini perlu mencakup sistem retribusi wisata, pembagian peran dan wewenang antaraktor (desa adat, Subak, Pokdarwis, pemerintah desa), serta mekanisme perlindungan kawasan pertanian dari potensi alih fungsi lahan. Regulasi ini menjadi landasan hukum dan arah kebijakan pembangunan yang dapat mengakomodasi prinsip keberlanjutan dan keadilan distribusi (Murphy, 1985).

c. Pengembangan Produk Wisata Edukatif Berbasis Subak

Salah satu keunggulan Belimbing Rice Terraces adalah keberadaan sistem Subak yang masih aktif dan otentik. Oleh karena itu, pengembangan paket wisata edukatif

berbasis pertanian menjadi strategi yang tepat untuk menarik segmen wisatawan minat khusus seperti wisata budaya, ekowisata, dan wisata edukasi. Atraksi wisata dapat mencakup tur pertanian organik, partisipasi dalam kegiatan Subak, observasi ritual pertanian, dan pengalaman tinggal di homestay berbasis komunitas. Strategi ini sejalan dengan nilai Tri Hita Karana dan semangat gotong royong yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali (Lansing, 2006; Sudiarta, 2021).

d. Promosi Digital Terpadu

Dalam era digital, promosi yang strategis dan terpadu menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan eksistensi destinasi di pasar global. Desa Belimbing perlu membangun strategi pemasaran digital melalui kerja sama dengan platform wisata daring, penggunaan media sosial (Instagram, YouTube, TikTok), kolaborasi dengan influencer lokal, serta pengembangan konten visual dan naratif berbasis keberlanjutan. Dengan promosi yang tepat, nilai-nilai lokal seperti Subak dan kehidupan agraris dapat dikemas menjadi daya tarik global (Cooper et al., 2008).

e. Pemberdayaan Generasi Muda Desa

Transformasi desa menuju destinasi wisata berkelanjutan membutuhkan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, pelatihan bagi pemuda desa perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan digital, penguasaan bahasa asing, pemanduan wisata, produksi konten kreatif, dan kewirausahaan pariwisata. Pelibatan pemuda akan memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan destinasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian konvensional.

Strategi-strategi di atas tidak hanya merespons tantangan aktual, tetapi juga mengarah pada penciptaan ekosistem pariwisata desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai lokal. Seperti dikemukakan oleh Suansri (2003), keberhasilan CBT ditentukan oleh sinergi antara community participation, resource conservation, dan benefit sharing, dengan dukungan struktur kelembagaan yang kuat dan kepemimpinan kolektif yang adaptif terhadap perubahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Belimbing Rice Terraces sebagai daya tarik wisata alam berbasis masyarakat di Desa Belimbing belum berjalan secara optimal, meskipun kawasan ini memiliki potensi ekologis, estetis, dan budaya yang sangat tinggi. Sistem pertanian subak yang lestari, keindahan lanskap sawah berundak, serta nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana menjadi kekuatan utama kawasan ini. Namun, berbagai keterbatasan, seperti belum adanya kelembagaan yang kuat, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya regulasi lokal, menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata masih bersifat spontan dan terbatas pada skala individu, belum terkoordinasi dalam sistem pengelolaan yang kolektif. Pokdarwis sebagai lembaga formal penggerak wisata belum menunjukkan kinerja yang efektif karena kekurangan kapasitas dan dukungan kelembagaan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan psikologis, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka community-based

tourism (CBT). Di sisi lain, tantangan-tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan promosi, dan ketiadaan regulasi desa memperkuat urgensi perlunya penguatan kapasitas lokal dan perencanaan strategis yang partisipatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, yakni: (1) penguatan kelembagaan Pokdarwis; (2) penyusunan regulasi desa (perdes) pengelolaan wisata; (3) pengembangan paket wisata berbasis edukasi, pertanian, dan budaya; (4) promosi digital yang terintegrasi; serta (5) pelibatan generasi muda melalui pelatihan dan pemberdayaan teknologi informasi. Strategi ini diharapkan dapat mengarah pada pembangunan wisata alam yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga adil secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat lokal.

Di samping simpulan di atas, penelitian ini juga memiliki implikasi sebagai berikut.

a. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan literatur tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dalam konteks lokal Bali. Temuan memperkuat teori CBT (Suansri, 2003; Timothy, 2002) bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya ditentukan oleh daya tarik fisik, tetapi juga oleh seberapa jauh masyarakat dilibatkan secara aktif dan setara dalam pengelolaan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti Tri Hita Karana, dalam kerangka keberlanjutan pariwisata.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa, pengelola Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan, program kerja, dan langkah-langkah operasional untuk pengembangan Belimbing Rice Terraces secara berkelanjutan. Penyusunan peraturan desa dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, strategi promosi digital dan pengembangan paket wisata berbasis edukasi dan budaya sangat relevan untuk menarik segmen wisatawan yang menghargai nilai-nilai lokal dan keaslian destinasi.

c. Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai pengukuran dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari pengembangan wisata berbasis masyarakat di kawasan pertanian. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi model kolaborasi lintas aktor (pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku industri) dalam pengelolaan destinasi berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. (2020). *Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata alam Air Terjun Nungnung di Desa Adat Nungnung, Kabupaten Badung* (Skripsi). Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Harlow: Pearson Education.

- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. (2021). *Data destinasi wisata alam dan budaya di Kabupaten Tabanan*. Tabanan: Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.
- Febrian. (2020). Pengelolaan wisata Kampung Blekok sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis community-based tourism Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 2(1), 22–30.
- Lansing, J. S. (2006). *Perfect order: Recognizing complexity in Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mowforth, M., & Munt, I. (2009). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World* (3rd ed.). London: Routledge.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. New York, NY: Methuen.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Prayogi, I. G. A. G., Sasmita, I. G. N. A., & Wardani, N. K. A. (2024). Pengelolaan desa wisata Pengelipuran dengan konsep green economy berbasis masyarakat lokal di era pandemi COVID-19. *Jurnal Kepariwisata dan Budaya*, 4(1), 20–33.
- Romeon, H., et al. (2021). Pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Negeri Saleman Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 6(3), 123–135.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Suansri, P. (2003). *Community-based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Sudiarta, I. M. (2021). *Pariwisata budaya Hindu Bali dalam perspektif Tri Hita Karana*. Denpasar: UHN I Gusti Bagus Sugriwa Press.
- Timothy, D. J. (2002). *Tourism and community development: International perspectives*. London: Routledge.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Yulianie, N. L. D., Putra, I. M. G. D., & Suryani, L. P. S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata budaya Kampung Todo Kabupaten Manggarai. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 5(2), 56–67.